

## **Perubahan Pola Perilaku Memilih Kaum Santri dalam Pemilu Daerah Serentak 2020 di Kabupaten Sumenep**

**Ahmad Sufaidi<sup>1</sup>, Rizca Yunike Putri<sup>2\*</sup>, Sucahyo Tri Budiono<sup>3</sup>**

Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Surabaya, Indonesia

*Submitted : 20 September 2022 Revision : 14 July 2023 Accepted : 27 July 2023*

### **Abstract**

*Sumenep as one of the regencies on Madura Island cannot be separated from the strong influence of Kiai and Pesantren (Islamic Boarding School) in it. Kiai as religious leaders and teachers not only hold a cultural role but also a political role, especially during the General Election. Candidates for regional leaders are certainly competing to get Kiai and Pesantrens to increase their winning potential. However, what is the actual position of Kiai and Pesantren in the life of an increasingly developing society. This article aims to discuss the shift in the role of Kiai in the Simultaneous Pilkada. By using a qualitative approach. Collecting data using observation, interviews, and observations. The results of the study show that the development of information, the split in support of Kiai and pesantren as well as practical transactions have made Kiai and pesantren unable to fully mobilize and influence people's political preferences in Simultaneous Regional Elections.*

**Keywords:** *Simultaneous Regional Election, Kiai, Pesantren (Islamic Boarding School)*

### **Abstrak**

Sumenep sebagai salah satu Kabupaten di Pulau Madura tidak bisa lepas dari kuatnya pengaruh Kiai dan Pesantren di dalamnya. Kiai sebagai pemuka agama dan juga guru tidak hanya memegang peran kultural tapi juga peran politik khususnya di masa Pemilihan Umum. Kandidat pemimpin daerah tentunya berlomba-lomba untuk memperoleh Kiai dan Pesantren untuk memperbesar potensi kemenangannya. Namun, bagaimana sebenarnya posisi Kiai dan Pesantren dalam kehidupan masyarakat yang kian berkembang. Artikel ini bertujuan untuk membahas pergeseran peran Kiai dalam Pilkada Serentak. Dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dengan menggunakan cara observasi, wawancara, dan observasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa perkembangan informasi, terpecahnya dukungan Kiai dan pesantren serta transaksi-transaksi praktis membuat Kiai dan pesantren tidak sepenuhnya mampu memobilisasi dan mempengaruhi preferensi politik masyarakat dalam Pilkada Serentak.

**Kata Kunci:** Pilkada Serentak, Kiai, Pesantren

**How to Cite:** Sufandi, A. et al. (2023). Perubahan Pola Perilaku Memilih Kaum Santri dalam Pemilu Daerah Serentak 2020. *Politeia: Jurnal Ilmu Politik*, 15 (2): 169 - 183.

---

\*Corresponding author: Rizka Yunita Putri

E-mail: rizcaputri.fisip@uwks.ac.id

## PENDAHULUAN

Ulama atau Kiai merupakan simbol dan tokoh masyarakat sebagai peran yang suci dan perilakunya patut untuk dicontoh bagi masyarakat umum. Kiai dianggap sebagai pemimpin komunal dan perannya dianggap masih penting terutama di wilayah-wilayah desa. Dhofier mendefinisikan, Kiai merupakan gelar kehormatan yang diberikan oleh masyarakat kepada ahli agama Islam yang mengajarkan kitab-kitab klasik kepada santrinya baik yang memiliki pondok pesantren ataupun memiliki pondok pesantren (Dhofier, 1983).

Kiai dan politik, khususnya dalam pelaksanaan Pemilihan Umum baik di daerah maupun pusat, merupakan fenomena yang sudah lama namun masih tetap ada hingga kini (Zainuddin, 2019). Clifford Geertz dalam *The Javanese Kijaji: The Changing Role of Cultural Broker* (Geertz, 1960), Kiai sangat dikenal dan dipercaya akan kemampuannya memobilisasi massa terutama sebagai *vote getter* walaupun memiliki kelemahan di sisi bargaining terhadap kebijakan politik. Wahyu Setiya Aji dan Muhammad Adnan (Aji & Adnan,

2020) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa Kiai sebagai bagian dari masyarakat dapat menjalankan peran politik khususnya dalam kampanye kandidat pemimpin daerah. Keterlibatan Kiai dalam kampanye politik bisa berperan sebagai actor dan bisa juga berperan sebagai partisan. Aktivitas politik Kiai sebagai actor yaitu dengan mengenalkan para kandidat yang didukung kepada masyarakat, bahkan tidak segan membawa mereka ke mimbar agama, sedangkan aktivitas sebagai partisan memposisikan perannya sebagai anggota partai politik dan bahkan secara resmi tercantum dalam tim sukses.

Peran kiai dalam kemenangan kandidat pemilu khususnya pada Pemilihan Pemimpin Daerah dinilai sangat efektif. Efektivitas peran ini karena ia berperan di dua level, yaitu sebagai konsolidator kekuatan politik di level elit dan sebagai mobilisator suara pemilih di level grassroot (Aziz, 2020). Namun peran kiai sebagai konsolidator tidak hanya dilakukan kepada santri dan masyarakatnya, tapi juga dilakukan dengan memperkuat relasi politik antar Kiai agar semua

kelompok masyarakat memiliki satu pandangan serta tujuan dalam menentukan pilihan politiknya (Chalik, 2015). Konsolidasi ini bertujuan untuk memastikan tidak ada Kiai dan pesantrennya yang berbeda pilihan serta sebagai upaya untuk menguatkan kekuatan politiknya (Hasanudin, 2017).

Selain itu, pada penelitian yang dilakukan oleh Nurhadi dan Sunarso, ditemukan bahwa dalam konteks Pemilihan umum interaksi antara Kiai dengan masyarakat sipil, Kiai memiliki 3 (tiga) peran yaitu sebagai patron politik masyarakat, elit politik, dan mediator politik (Nurhadi & Sunarso, 2018). Peran Kiai sebagai patron politik menjadi preferensi masyarakat dalam menentukan pilihan politik mereka. Kemudian peran Kiai sebagai elit politik aktif ditunjukkan sebagai subjek yang dimasukkan kepengurusan partai politik dan mobilisasi massa dalam kampanye. Terakhir, Peran Kiai sebagai mediator politik memiliki peran sebagai katalisator atau penengah dalam konflik politik.

Pergeseran peran Kiai yang mulanya sebagai pemimpin dan pengajar ilmu agama kepada santrinya ditambah dengan peran politik memang awalnya diterima bahkan dijadikan preferensi oleh para santri dan masyarakat dalam menentukan preferensi politiknya. Penelitian yang dilakukan Saidin Ernas dan FM. Siregar di Yogyakarta menemukan fakta bahwa dengan aktinya Kiai dan pesantren dalam politik praktis membuat tidak hanya dilegitimasi posisi mereka, tapi juga membuat masyarakat resisten terhadap lembaga keagamaan tersebut (Ernas & Siregar, 2010)

Sependapat dengan Ernas dan Siregar, resistensi masyarakat ini juga ditunjukkan oleh M. Hosnan dalam penelitiannya. Hosnan (Hosnan, 2019) mendeskripsikan bahwa Kiai khususnya di Madura lebih tertarik pada transaksi-transaksi materi yang dilakukan oleh para kandidat dan dibenarkan dengan menggunakan dasar teks kitab suci. Praktek transaksional politik ini menimbulkan *distrust* di kalangan masyarakat yang efeknya kekalahan dari kandidiat yang

berasal dari keluarga Kiai atau kandidat yang didukung oleh pesantren pada tahun 2009 dan 2014.

Perkembangnya, selain adanya *distrust* kepada Kiai dan pesantren, kelompok santri dan masyarakat awam di era kontemporer ini mulai mengenal sumber informasi selain kiai dan memiliki *rational choice* dalam menentukan sikapnya. Masyarakat awam dan santri sebagai *voters* memiliki sisi *rational choice* (Putri, 2015) yang maknanya mampu memilih kandidat berdasarkan indikator-indikator rasional dengan salah satunya secara positif adalah program kerja, dan yang negative adalah factor transaksi. Penelitian Masruri, Sobari, dan Tawwakal dengan studi kasus Pemilihan Gubernur Jawa Timur tahun 2018 (Masruri, Sobari, & Tawwakal, 2019) mendeskripsikan hubungan antara Kiai dan santri tidak lagi patron-client dan Kiai cenderung bersikap terbuka terhadap pilihan politik santrinya berdasarkan preferensi kandidat dan politiknya masing-masing. Selain keterbukaan sikap Kiai, pengaruh persaingan kekuatan kapital dari pengusaha-politisi juga ikut serta menggeser

posisi opini Kiai. Bentuk yang paling umum adalah traksi yang dilakukan kandidat berupa *money politics* kepada santri dan masyarakat untuk memperoleh dukungan suara secara praktis (Zamroni, 2007).

Di Kabupaten Sumenep ada kecenderungan yakni mulai memudarnya sikap fanatis terhadap suatu ideologi parpol keagamaan. Sumenep di masa Orde Baru, sekalipun rakyat tidak suka pada Golkar, birokrasi dan aparat keamanan negara memaksa rakyat agar mencoblos gambar partai yang berlambang pohon beringin tersebut. Di tengah tengah adanya paksaan dari aparat pemerintah, rakyat masih mencoba melakukan perlawanan dengan memilih parpol yang di dalamnya berideologi agama masih amat dominan.

Setelah reformasi, rezim kiai memimpin tampuk pemerintahan di sebagian besar kabupaten yang ada di Madura, masyarakat sudah mulai mampu menilai manajemen pemerintahan yang dijalankan. Dalam penilaian itu, sikap kritis mulai ditunjukkan, bahwasanya hampir tidak ada perbedaan yang signifikan

dalam menciptakan perubahan kesejahteraan rakyat antara di masa rezim pemerintahan birokrat-Golkar dan di masa rezim Kiai.

Pemilu Daerah Serentak 2020 di Kabupaten Sumenep munculnya semboyan “Bupati Asal Bukan Kiai” menunjukkan fenomena memuncaknya kekecewaan masyarakat terhadap permainan politik kiai. Namun, apa yang membuat kekecewaan masyarakat di SUMenep terhadap Kiai dan pesantren? Penelitian ini ingin melihat bagaimana pergeseran peran Kiai yang terjadi di Kabupaten Sumenep selama Pilbup Kabupaten Sumenep 2020. Hasil dari penelitian ini Kiai yang memiliki peran politik di Madura, khususnya Kabupaten Sumenep tidak lagi mampu mempengaruhi preferensi masyarakat terhadap kandidat calon bupati dan wakil bupati yang diusung oleh pihak pesantren.

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Sugiyono (Sugiyono, 2012) mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang

berdasarkan pada filosofi positivis dan digunakan untuk meneliti objek yang sifatnya alamiah. Peneliti dalam penelitian ini memposisikan diri sebagai instrument kunci yang berperan mengumpulkan data dan informasi. Teknik pengumpulan data yang dilakukan secara gabungan atau *ditriangulasi* (Usman & Purnomo, 2008). Analisis data bersifat induktif, serta hasil penelitian dari metode ini menekankan pada makna dari pada generalisasi secara makro.

Penelitian ini dilaksanakan di kabupaten Sumenep. Alasan dipilihnya Kabupaten Sumenep sebagai lokasi penelitian adalah kandidat yang maju sebagai calon dan wakil bupati adalah banyak yang berasal dari kalangan Pesantren dan keadaan menjadi sangat menarik karena ada dua kubu yang sama-sama kuat dengan latar belakang pengusaha dan dibantu oleh Kiai. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara, observasi, dan dokumen. Data yang diperoleh melalui wawancara merupakan data primer sedangkan data yang diperoleh dari observasi dan dokumen merupakan

data sekunder. Penentuan subjek penelitian menggunakan teknik purposive dengan narasumber yang menjadi rujukan penelitian ini dipilih berdasarkan kapasitasnya sebagai tokoh sosial masyarakat dan juga pejabat publik. Untuk melindungi identitas narasumber, peneliti menggunakan inisial samaran namun tetap melampirkan hasil wawancara yang diperoleh peneliti.

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan temuan penelitian, peneliti memberikan klasifikasi kedalam kajian perilaku dan elit politik. Kajian Perilaku khususnya perilaku politik dan memilih oleh Max Weber, (Ritzer & Goodman, Teori Sosiologi Modern, 2010) dalam buku Teori Sosiologi Modern dijelaskan sebagai tindakan sosial yang dibedakan menjadi tindakan sosial menjadi empat tipe, yaitu tindakan afeksi, tindakan tradisional, tindakan rasional berorientasi nilai, dan tindakan rasional instrumental. Perilaku atau tindakan afektif dipahami sebagai tindakan yang sebagian besar didominasi atau diinisiasi oleh perasaan dan emosi dengan atau tanpa pertimbangan-

pertimbangan akal budi. Kemudian perilaku atau tindakan tradisional merupakan tindakan subyek yang didasari oleh karena kebiasaan yang berlaku di dalam masyarakatnya atau lingkungan sosial. Dan, perilaku atau tindakan rasional instrumental dan rasional dipahami dilakukan subjek dengan perhitungan antara kesesuaian dan cara yang digunakan dengan target atau tujuan yang ingin dicapai (Ritzer, 1992).

Kelompok santri dalam masyarakat yang dikenal tradisional umumnya menunjukkan perilaku atau tindakan yang sifatnya afektif atau tradisional (Tanthowi, 2005) dengan unsur kyai/kiai sebagai elit lokal yang tidak hanya berperan sebagai pemuka agama tapi juga orag dianggap suci serta panutan. Konteks perilaku santri dalam ranah politik yang diteliti oleh tim tentunya sangat berbeda dengan hasil tersebut karena dalam perkembangannya mengalami pergeseran secara rasional dimana santri dalam berperilaku khususnya politik menempatkan diri dengan rasional dan mempertimbangan aspek untung rugi bagi dirinya secara pribadi.

### **Peran Kiai dalam Pilkada di Madura**

Madura sebagai pulau dan juga kelompok etnis di Jawa Timur sangat dikenal dengan kultur dan tradisi Islam yang sangat kuat dan fanatic. Kehidupan keseharian masyarakat Madura tidak bias dilepaskan sedikitpun dari kultur dan tradisi Islam dan juga peran Kiai di dalamnya. Pengaruh Kiai bagi masyarakat Madura sangat besar bahkan melampaui pengaruh lembaga-lembaga pemerintah dan lainnya. Mereka meyakini jika tidak ada restu atau dukungan dari Kiai, suatu program tidak akan berjalan dengan baik bahkan diprediksi tidak akan berjalan mulus. Ketaatan dan kepatuhan kepada Kiai dianggap sebagai berkah dan semua ucapan serta tata kelakuan Kiai dianggap sebagai sebuah kebenaran. Hal ini membuat posisi Kiai menjadi pusat kehidupan masyarakat Madura.

Kekuatan kultur Islam di Madura bias ditelusuri sejak Era Sebelum Indonesia merdeka, Orde Lama, Orde Baru, bahkan hingga sekarang. Pada Pemilu tahun 1955, tiga partai besar Islam yaitu PNI, Masyumi, dan NU

memperoleh suara mayoritas di Karesidenan Madura (Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep). Sedangkan pada era pemerintahan Orde Baru, Golkar tidak pernah unggul dan selalu kalah dari PPP. Dan masa reformasi hingga sekarang, kekuatan politik di Madura didominasi oleh Kiai dan pesantren.

Kekuatan Kiai dan politik di Madura sudah sudah seperti satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan (Prastiwi, 2015). Pada tahun 2003 di Kabupaten Bangkalan kekuatan Kiai Fuad Amin melalui KH. R. Fuad Amin Imron hingga keturunannya mampu menjadi pemimpin dan menang pada Pilkada hingga sekarang. Kabupaten Sampang periode tahun 2013 hingga 2018 dipimpin oleh Kiai KH. Fannan Hasib. Kemudian di Kabupaten Pamekasan, Bupati Badrut Tamam merupakan keturunan Kiai. Dan di Kabupaten Sumenep sejak periode 2010 hingga 2020 dipimpin oleh KH. A Busyro Karim yang merupakan seorang Kiai.

### Kiai dalam Pilkada Sumenep 2020

Masyarakat Madura, khususnya di Kabupaten Sumenep memiliki kecenderungan untuk taat dan patuh pada apa yang diopiniikan dan diajarkan oleh Kiai/Ulama. Kabupaten Sumenep berdasarkan data Biro Pusat Statistik mencatat ada total 230 Pondok Pesantren (Biro Pusat Statistik Kabupaten Sumenep, 2020). Meskipun bukan bagian dari pesantren, masyarakat umum khususnya di Kabupaten Sumenep menempatkan posisi Kiai/Ulama menjadi simbol dan tokoh masyarakat di Madura sebagai orang suci dan perilakunya patut untuk dicontoh. Hal tersebut juga mendasari bagaimana suara Kiai/Ulama dalam memberikan preferensi calon pemimpin daerah. Masyarakat dan juga kaum santri akan bertanya lebih dahulu pada Kiai sebagai junjungannya untuk memberikan suara kepada calon yang mana.

Tahun 2020, Kabupaten Sumenep menjadi salah kabupaten yang melaksanakan pilkada serentak. Pilkada Serentak Sumenep 2020 terdapat dua calon yang bersaing yaitu pasangan Achmad Fauzi dan Hj. Dewi

Khalifah yang didukung oleh koalisi partai PDIP, PAN, Gerindra, PKS dan PBB serta pasangan RB. Fattah Jasin dan KH. Moh Ali Fikri yang didukung oleh koalisi partai PKB, PPP, Demokrat, NasDem, dan Hanura.

Kedua kandidat ini merupakan kandidat yang sama-sama didukung oleh ulama/Kiai. Pada pasangan Achmad Fauzi dan Hj. Dewi Khalifah didukung oleh Nyai Eva yang merupakan ketua PC Muslimat NU Sumenep sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Aqidah Usymuni Terate. Sedangkan pada pasangan kedua yaitu RB. Fattah Jasin dan KH. Moh Ali Fikri, selain ada Kiai Ali Fikri sebagai calon bupati juga merupakan Kiai muda kharismatik dan Pengasuh Pondok Besar Annuqoyah serta didukung oleh Kiai Ramadhan dan Kiai Busro.

Perkembangannya, Pilkada Sumenep 2020 muncul moto "Bupati Asal Bukan Kiai" menjadi pengaruh negative bagi kandidat yang murni dari pesantren. Dalam penelitian ini berdasarkan data yang dihimpun peneliti, menunjukkan bahwa dari sebelas (11) narasumber hanya 2 saja yang masih menganggap pengaruh politik Kiai/Ulama besar di



masyarakat. Mayoritas narasumber tidak lagi memandang peran Kiai/Ulama sebagai tokoh sentral penentu kemenangan calon bupati/wakil bupati.

Salah satu narasumber, yakni AMZ, yang peneliti wawancarai menyebutkan bahwa posisi Kiai sebagai pemuka dan guru ilmu Islam masih sangat dihormati oleh santri dan masyarakat, namun jika sudah menyebutkan politik dan harus memobilisasi santrinya untuk memilih kandidat bupati/wakil bupati posisinya akan berbalik dari tokoh yang disegani dan akan diikuti perilakunya terutama oleh penduduk yang mayoritas adalah *santi-santrinya* ternyata sudah tidak mendapat perhatian lagi. Secara tersita, AMZ menegaskan bahwa kandidat Fatah Yasin didukung oleh kurang lebih 160 pesantren akan tetapi nyatanya kalah (Sumber: Hasil Wawancara – Narasumber AMZ).

Selain AMZ, pernyataan narasumber FJR dan AHJ juga makin menguatkan bahwa Kiai/Ulama tidak lagi menjadi tokoh sentral yang mempengaruhi preferensi pemilih

pada Pilkada Kabupaten Sumenep 2020 (Sumber: Hasil Wawancara – Narasumber FJR dan AHY). FJR dan AHY menjelaskan bahwa meskipun Kiai Ramadhan dan Kiai Busro beserta dengan PKB sudah memberikan dukungan kepada Fatah Yasin, namun nyatanya suara pemilih tetap condong ke kandidat Ahmad Fauzi.

Seruan Kiai tidak lagi mampu sepenuhnya mempengaruhi dan menyatukan preferensi pemilih lebih dikarenakan salah satunya adalah kekuatan pesantren yang sudah terpecah/tidak bersatu untuk mendukung satu kandidat. Total jumlah pondok pesantren yang mendukung kandidat nomor dua kuantitasnya lebih besar dan namun tidak mampu menyaingi perolehan suara kandidat nomor satu. Artinya, pesantren tidak lagi kompak untuk mendukung hanya salah satu kandidat namun terbagi ke kandidat yang lain. IMS, salah satu narasumber yang masih menganggap seruan Kiai mampu memobilisasi massa pada saat ini menyayangkan sikap para Kiai dan pondok pesantren yang tidak kompak

(Sumber: Hasil Wawancara – dengan ulama, santri dan NU Narasumber IMS).

Pernyataan IMS ini pun diamini oleh Narasumber MIQ yang memiliki pandangan yang sama bahwa pondok pesantren bahkan kelompok NU sudah terbelah di Sumenep. MIQ dan IMS menjelaskan bahwa kekompakan pesantren bukanlah opsi calon tunggal, namun lebih kepada persatuan Kiai dan pondok pesantren untuk mendukung satu kandidat saja kompak (Sumber: Hasil Wawancara – Narasumber IMS dan MIQ).

Pecahnya dukungan kepada kandidat dan tidak adanya kesatuan suara tentunya sudah bertentangan dengan peran konsolidasi yang seharusnya dimiliki oleh Kiai sebagai tokoh masyarakat yang menjadi sentral opini. Artinya dalam konteks Pilkada Serentak Sumenep, Kiai dan pondok pesantren tidak lagi mampu menjalankan peran konsolidasi politik dengan fakta adanya perpecahan dalam pemberian dukungan kepada kandidat calon pemimpin daerah.

Selain posisi pesantren yang terpecah, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang cenderung diasosiasikan

dengan ulama, santri dan NU mengajukan calon yang tidak populer di masyarakat. Narasumber FJR, yang merupakan salah satu anggota dewan dan memiliki jabatan strategis, menjelaskan bahwa keputusan PKB untuk mendukung Fattah Yasin merupakan kesalahan besar. Kandidat tersebut dinilai masih baru menjadi kader di partai Islam terbut, berbeda dengan Achmad Fauzi yang merupakan santri dan dikuatkan dengan simbol-simbol yang ditampilkan olehnya dalam kesehariannya, memakai sarung, memakai peci dan duduk di lantai (Sumber: Hasil Wawancara – Narasumber FJR).

### **Upaya Transaksi yang Dilakukan Kandidat untuk Memperoleh Suara**

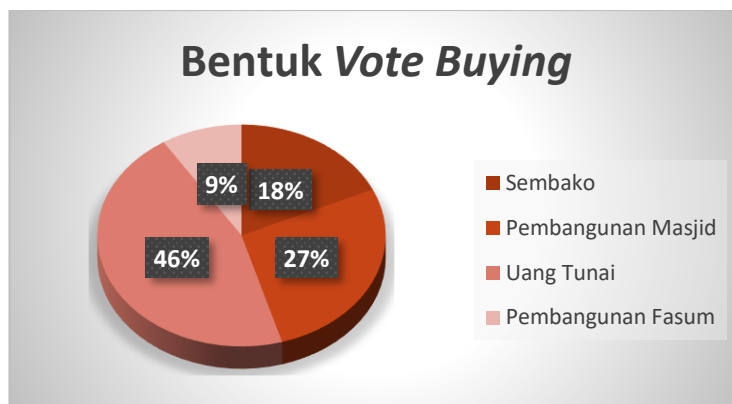
Selain faktor masyarakat sudah tidak lagi menggunakan Kiai sebagai preferensi suara, masyarakat Sumenep sudah memiliki preferensi rasional yaitu dengan membandingkan para calon apakah memiliki history buruk dan track record calon tersebut, bagaimana penyikapan terhadap masyarakat selama belum menjadi calon pemimpin daerah, bagaimana

posisi partai yang mendukung dan yang paling penting berapa yang dibagikan kepada masyarakat.

Pemilihan Umum baik daerah maupun pusat (legislatif dan presiden, vote buying atau memberikan materi berupa uang atau barang kepada konstituen bukan sebuah masalah yang dianggap tabu. Bahkan, agenda ini dianggap sudah seperti seremonial umum dan kerap dilakukan oleh para calon kepada konstituennya. Para calon bupati khususnya di Kabupaten Sumenep menganggap Vote buying sebagai upaya menjaring suara

konstituen dan juga rasa terimakasih para calon karena sudah memilih calon tersebut.

Sudut pandang masyarakat sebagai konstituen yang peneliti ambil dari 11 narasumber, memandang upaya vote buying yang dilakukan oleh para calon, bentuk vote buying yang dilakukan pun berbeda. Berdasarkan hasil data lapangan yang dikumpulkan peneliti, bentuk vote buying yang dilakukan antara lain seperti dalam grafik di bawah ini:



Grafik 1. Bentuk Pemberian Vote Buying

Sumber: Hasil Analisa

Berdasarkan grafik di atas, bentuk terpopuler yang dilakukan oleh para calon adalah pemberian uang tunai, kemudian bantuan pembangunan masjid, lalu bantuan

sembako kepada masyarakat, dan terakhir adalah bantuan pembangunan fasilitas umum.

Bentuk bantuan yang paling menarik menurut hasil temuan

peneliti, bukan lagi pada aspek besaran dana ataupun bentuk sembako serta alasan mengapa harus masjid, tapi ada beberapa detail penjelasan yang diberikan oleh narasumber. Salah satunya tentang pemberian sembako, menurut AHJ transaksi yang dilakukan kandidat baik kepada masyarakat langsung ataupun melalui perantara Kiai memandang bahwa transaksi yang dilakukan mayoritas adalah sebagai tanda terima kasih karena memberi dukungan dan upaya mengikat suara. AHJ secara pribadi menilai bila bantuan diberikan dalam bentuk amplop (uang tunai) dinilai haram maka jika bantuan berupa sembako dinilai tidak masalah dan tidak berbenturan dengan nilai etika dasar serta hukum.

Kemudian pada bentuk bantuan pembangunan sarana ibadah atau masjid. Memberikan bantuan pembangunan dianggap tidak menyalahi etika dasar bagi warga Madura Sumenep. Dan bagi para calon pemimpin daerah, bantuan ini dianggap sebagai upaya pencitraan bahwa kandidat tersebut peduli akan kondisi rumah ibadah dan juga sebagai

simbol charity. Meskipun dalam teori politik, hal tersebut masuk dalam agenda vote buying yang kerap dilakukan oleh para calon di tengah masyarakat yang agamis.

Bantuan berupa pembangunan masjid dan perbaikan fasilitas umum dijelaskan oleh narasumber MJL dan ATQ sebagai bentuk bantuan yang ditawarkan oleh warga. Tentunya sebelum agenda tersebut dilakukan, tim sukses dari semua kandidat awalnya berdiskusi dengan warga untuk menanyakan kebutuhannya dan berapa suara yang akan dijanjikan jika kebutuhan terkait pembangunan tersebut sudah direalisasikan.

Terakhir pada bentuk pemberian uang tunai. Bentuk vote buying paling umum dan paling dikenal oleh masyarakat adalah money politics – meskipun konsepnya bisa jadi berbeda – yang paling dimengerti dan sering dilakukan oleh para calon. Umumnya, praktek ini diberikan dalam bentuk pemberian uang dari calon kepada masyarakat melalui perantara tim kemenangan tiap kandidat kepala daerah.

Tiga narasumber peneliti yaitu ATQ, FJR dan MJL menjelaskan,

transaksi amplopan yang dilakukan oleh kandidat pasti dilakukan, khususnya pada detik-detik terakhir menjelang habisnya masa kampanye atau mendekatai hari pemberian suara. Ketiga narasumber menguatkan pernyataan bahwa semua kandidat pasti memberikan uang tunai kepada para calon pemilihnya. Namun dari ketiga pernyataan dalam kutipan wawancara tersebut yang menarik adalah adanya peran orang ketiga sebagai tim sukses yaitu aparat birokrasi khususnya kepala desa yang ditunjuk sebagai mobilisator dan penyebar opini warganya.

## **SIMPULAN**

Kiai atau ulama yang selama Era Orde Baru hingga masa Post Reformasi memegang penting sebagai penyambung dan juga pusat opini warga khususnya santri tidak lagi menjadi pusat pengaruh. Peran Kiai tergerus oleh rasionalisasi warga dan santri dalam menentukan preferensi memilihnya. Dalam Pilkada di Kabupaten Sumenep Tahun 2020, meskipun salah satu calon mampu menguasai pondok pesantren hingga 70% di wilayah ini dan didukung oleh

partai yang mayoritas kadernya adalah santri, nyatanya tidak mampu mengalahkan calon yang hanya didukung oleh 15% pondok pesantren dan diusung oleh partai non-agamis.

Faktor kemenangan para kandidat kepala daerah tentunya sangat dipengaruhi oleh preferensi dari pemilihnya sebagai dasar menentukan pilihan masing-masing personal. Pemilih rata-rata jika dibuat peringkat, akan memilih kandidat karena aspek (1) ketokohan kandidat; (2) track record kandidat; (3) Kerjasama antara kandidat dan kepala desa; (4) vote buying atau pemberian yang dilakuak oleh kandidat.

Vote buying atau memberikan materi berupa uang atau barang kepada konstituen bukan sebuah masalah yang dianggap tabu. Bahkan, agenda ini dianggap sudah seperti seremonial umum dan kerap dilakukan oleh para calon kepada konstituennya. Para calon bupati khususnya di Kabupaten Sumenep menganggap Vote buying sebagai upaya menjaring suara konstituen dan juga rasa terimakasih para calon karena sudah memilih calon tersebut.

Bentuk terpopuler yang dilakukan oleh para calon adalah pemberian uang tunai, kemudian bantuan pembangunan masjid, lalu bantuan sembako kepada masyarakat, dan terakhir adalah bantuan pembangunan fasilitas umum.

Keterbatasan dalam waktu penelitian dan batasan penelitian, masalah lain yang masih belum dapat dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana perubahan perilaku politik santri khususnya yang berisan dengan masalah gender. Perkembangan sosio kultur memberikan banyak kesempatan kepada santriwati mengembangkan potensi dan juga kesempatan dalam mempengaruhi proses politik.

#### UCAPAN TERIMAKASIH

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan kesempatan melalui pendanaan penelitian Enimas UWKS. Tidak lupa ucapan terimakasih kepada LPPM UWKS yang telah banyak membantu dalam hal administrative serta biroktatis sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Aji, W. S., & Adnan, M. (2020). Hubungan Peran Kyai, Perilaku Pemilih dengan Pilihan Masyarakat Banjarnegara pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018. *Journal of Politic and Government Studies, Volume 09*(Nomor 02).
- Aziz, R. A. (2020). Kiai dan Politik Elektoral: Peran Kiai Yusuf Chudlori dalam Pemenangan Kandidat Jokowi-Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019 di Kecamatan Tegalrejo. *Jurnal PolGov, Vol. 2*(No. 2), 223-276.
- Chalik, A. (2015). Elite Lokal Berbasis Pesantren dalam Kontestasi Pemilihan Kepala Daerah di Jawa Timur. *KARSA: Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman, Volume 23*(No. 2), 363-381.
- Dhofier, Z. (1983). *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai*. Jakarta: LP3ES.
- Ernas, S., & Siregar, F. M. (2010). Dampak Keterlibatan Pesantren dalam Politik: Studi Kasus Pesantren di Yogyakarta. *Kontekstualita, Vol. 25*(No. 2), 195-224.
- Geertz, C. (1960). The Javanese Kijaji: The Changing Role of Cultural Broker. *Journal Comparative Studies in Society and History, Volume 2*(No. 2), 228-249.
- Hasanudin, S. (2017). Mekanisme Religio-Politik Pesantren: Mobilisasi Jaringan Hamida dalam Politik Elektoral Tasikmalaya. *Jurnal Sosiologi, Volume 22*(No. 1), 53-80.
- Hosnan, M. (2019). Pudarnya Kharisma Kiai dalam Kontestasi Politik Lokal di Madura. *Jurnal Pemikiran dan Ilmu Keislaman, Volume 2*(No. 2), 308-327.
- Masruri, Sobari, W., & Tawwakal, G. T. (2019). Kyai-Santri Relationship in Electoral Politics: A Critical Point of View. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Volume 4*(No. 2), 75-89.
- Nurhadi, & Sunarso. (2018). Peran Kiai dalam Membangun Partisipasi Pemilih. *Jurnal*

- Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Volume 3*(No. 2), 169-172.
- Putri, R. Y. (2015). Electoral System Design, Rational Voter Behavior. *International Conference on Democracy and Accountability (ICoDA)* (pp. 64-69). Universitas Airlangga.
- Ritzer, G. (1992). *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Jakarta: Rajawali.
- Ritzer, G., & Goodman, D. J. (2010). *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Kencana.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Tanthowi, P. U. (2005). *Kebangkitan Politik Kaum Santri*. Jakarta: PSAP.
- Usman, H., & Purnomo, A. S. (2008). *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Zainuddin. (2019, Agustus). Kiai dan Politik: Implikasi dan Masa Depan Lembaga Pendidikan Islam di Sumatera Selatan. *Jurnal Riset dan Konseptual, Volume 4*(No. 03), 331-340.
- Zamroni, I. (2007). Juragan, Kiai dan Politik di Madura. *UNISIA Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial, Volume 30*(No. 65), 264-276.